

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, N. (2007). *Transparansi Dan Akuntabilitas Public Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Agoes, S. dan A. (2009). In *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, sri devi, & Srimindarti, C. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding, 2017*, 978–979.
- Amalia, Z., Malikah, A., & Mahsuni, A. W. (2020). No Title. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Sesuai Dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (Studi Kasus Di Desa Se-Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(08).
- Andi., M. (2002). No Title. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Aprisiami, P. (2012). No Title. *Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Pwerto. S1. Thesis*.
- Aset, J., Riset, A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Jember, U. M. (2018). The Role of Intellectual Capital To Economic Value Added (Empirical Study on Manufacturing Companies of Consumption Goods Sector). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>
- Desa, P. M. D. N. N. 113 T. 2014 T. P. D. K. (n.d.). No Title. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Keuangan Desa*.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Mahsun. (2015). *Mahsun. (2015). Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Nur, S. W. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros*. 5(April), 725–739. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>
- Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021*.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun Tentang Desa 2014*.
- Widjaja, A. W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat Dan Utuh*. Raja Grafindo Persada.

*Jakarta.*

